



Pemkot Rehab 385 Rumah tak Layak Huni

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Pada tahun mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan merehabilitasi sedikitnya 385 Rumah Tak Layak Huni (RTLH). RTLH ini sebagian besar berada di bantaran sungai di wilayah Kota Yogyakarta.

Perbaikan rumah ini, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad, baru mencakup 12 persen dari seluruh RTLH yang ada di wilayahnya. Di Kota Yogyakarta, menurut dia, RTLH ini mencapai 3.343 rumah. "Ke depan kita akan menggandeng pihak swasta dalam

perbaikan rumah tak layak huni ini," kata dia, Selasa (2/12).

Menurut Edy, perbaikan RTLH pada tahun mendatang akan melibatkan pemerintah pusat. Sebanyak 195 rumah akan direhabilitasi melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sedangkan 190 rumah lainnya akan ditangani Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Yogyakarta. Ia mengatakan, RTLH yang diperbaiki tersebut berdasarkan pada hasil pendataan ulang Bappeda pada 2014. Dalam pendataan itu sudah tercantum data identitas dan alamat warga pemilik RTLH. Hasil pendataan ulang itu juga ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota

Nomor 393/2014. "Sasarannya yang akan diperbaiki sudah jelas," ujar dia.

Edy mengatakan, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) juga memiliki anggaran untuk penataan kawasan kumuh. Menurut dia, perbaikan RTLH itu juga termasuk dalam penataan kawasan kumuh. Dengan ini, ia mengatakan, penanganannya perbaikan RTLH akan berjalan lebih cepat.

Ia mengharapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga bisa masuk dalam usaha perbaikan RTLH, seperti pada tahun lalu. "Termasuk jika ada CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan yang akan diarahkan untuk perbaikan RTLH," kata dia.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah Kimpraswil Kota Yogyakarta Hendra Tantular, 190 RTLH yang akan diperbaiki sudah didata oleh Bappeda setempat. Ia mengatakan, akan ada prioritas wilayah sasaran perbaikan berdasar pada keputusan wali kota nanti. Rencananya, ia mengatakan, setiap RTLH akan menerima bantuan perbaikan sekitar Rp 8 juta. Bantuan itu akan diwujudkan dalam bentuk material bangunan sesuai dengan kerusakan rumah. Dinas juga, menurut dia, akan bekerja sama dengan pemerintah wilayah, karena perbaikan RTLH itu dilakukan secara swakelola oleh pihak ketiga. ■ ed: irfan filtrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembangunan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Permukiman dan Prasarana			

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005